

## **KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI KORBAN BENCANA BANJIR DI KAMPUNG LAMBING KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Fendi Irawan Sirapati<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Fendi Irawan Sirapati, Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si dan Bapak Dr. Anthonius Margono, M.Si*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk deskriptif kualitatif. Key informannya yaitu Kepala BPBD Kabupaten Kutai Barat dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Kutai Barat. Informannya yaitu Tokoh masyarakat Kampung Lambing yang tugasnya berhubungan dengan masalah yang diteliti serta informan lainnya yaitu Staf seksi Logistik dan Kedarutan BPBD. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai BPBD memiliki kreativitas saat menanggulangi korban bencana banjir di kampung yang terkena bencana banjir. Kerjasama BPBD dilakukan dimana saja, di lokasi bencana. Pegawai BPBD memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam penanggulangan korban banjir, yang dilakukan di tempat bencana penanggulangan korban masyarakat. kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran dalam mengerjakan penanggulangi korban bencana banjir anggota BPBD yang dilakukan tidak menimbulkan korban bencana banjir meninggal dunia. BPBD bertanggung jawab dalam menanggulangi korban bencana banjir, untuk lebih dekat dengan masyarakat maka BPBD telah membentuk posko penanggulangan bencana ditiap kecamatan dan telah berjalan setelah dua tahun terbentuknya BPBD. Posko di bentuk agar masyarakat yang terkena bencana dapat segera tertolong.*

***Kata Kunci*** : *Kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bencana banjir*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrai Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [fendyirawan@gmail.com](mailto:fendyirawan@gmail.com)

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk bencana alam. Bencana alam merupakan fenomena alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kehancuran lingkungan yang pada pembangunan yang telah dibangun selama ini. Bencana alam yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam seperti tanah, hutan, dan air secara berlebihan serta akibat perubahan cuaca atau iklim global telah mengakibatkan bertambahnya lahan kritis, selain itu dampaknya akan mengubah tata guna air, sehingga dapat mengakibatkan banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan laju erosi dan sedimentasi.

Salah satu fenomena alam yang menimbulkan kerugian besar yang selalu mengancam beberapa wilayah di Indonesia adalah bencana banjir. Banjir merupakan suatu fenomena alam biasa, namun akan menjadi suatu yang sangat merugikan jika mengancam keberadaan hidup manusia. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berbagai peristiwa banjir pada tahun 2013 sampai awal 2015 jumlah bencana banjir telah terjadi 3.708 kali, ini menunjukkan bahwa Indonesia rawan akan bencana banjir.

Banjir merupakan genangan air dalam jumlah besar yang biasanya disebabkan oleh meluapnya air sungai karena debit air yang melebihi dayaampungnya. Fenomena alam ini cukup sering terjadi di Indonesia, banjir melanda hampir di setiap musim penghujan. Tidak hanya di kota-kota besar dengan sedikit area resapan air yang terkena banjir, di daerah pedesaan pun demikian. Banyak faktor yang menyebabkan suatu daerah terkena banjir, antara lain bentuk Daerah Aliran Sungai (DAS), gradien sungai, kerapatan drainase, lereng rata-rata DAS dan penggunaan lahan. Parameter tersebut bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan kerentanan potensi banjir di suatu daerah.

Sadar akan posisi sebagai “negara bencana”, maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, BNPB pun dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 ayat (2) dari Undang - Undang yang sama menyatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri.

Pasal 18 di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kotamadya. Berdasarkan atas hal diatas maka pemerintah kabupaten Kutai Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 06 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Empat tahun setelah dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Kutai Barat, Kutai Barat harus menghadapi banjir pada awal 2015. Hal ini disebabkan sungai – sungai tersebut merupakan sungai

musiman, pada musim penghujan sering terjadi banjir dan pada musim kemarau terjadi kekeringan. Bentuk sungai Kutai Barat yang berkelok – kelok Kondisi ini sangat berpengaruh pada jenis dan karakteristik alirannya.

Kabupaten Kutai barat Secara Geografis terletak antara 113°048'49" sampai dengan 116°032'43" Bujur Timur serta di antara 103°1'05" Lintang Utara dan 100°9'33" Lintang Selatan. Adapun wilayah yang menjadi batas Kabupaten Kutai Barat adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Malinau dan Negara Sarawak (Malaysia Timur) di sebelah Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara di sebelah Selatan dan untuk sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah serta Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Kutai Barat diwilayah yang sangat strategis ditengah – tengah antara kabupaten dan provinsi. Namun karena banjir ini menyebabkan kerugian dari berbagai pihak baik bagi warga yang menempati wilayah - wilayah banjir sampai persawahan, peternakan, serta pertambakan.

Di kecamatan Muara lawa tepatnya dikampung Lambing kondisi banjir yang meluap menyebabkan peternakan ayam dan pertambakan ikan mati. Imbas dari kejadian banjir menyebabkan perekonomian warga terancam gagal total. Tak cukup sampai disitu jalan poros menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Tengah ikut tergenang banjir dan derasnya aliran air sungai bisa saja menghanyutkan warga / kendaraan yang melintas.

Sudah sepatutnya seluruh stakeholder khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengambil langkah meminimalisir dampak dari terjadinya banjir. Dari tahun ketahun Kutai Barat di wilayah Kampung Lambing Kecamatan Muara lawa bisa dikatakan langganan banjir apabila terjadi musim hujan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutai barat mempunyai kontijensi bencana dianggap harus tanggap dalam menghadapi bencana. Tanggap dalam arti mampu membaca situasi misalnya dengan mendirikan posko siaga bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dapat Melibatkan seluruh instansi serta menaungi instansi-instansi yang turut andil dalam penanggulangan bencana seperti PMI, SAR, TNI, POLRI, PRAMUKA, dan lain lain, sehingga manajemen penanggulangan bencana dapat berjalan dengan lancar karena adanya kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang baik.

Peristiwa banjir yang terjadi pada awal tahun 2015 memperlihatkan kurangnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 63 tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri. Dalam hal ini kinerja pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat besar tanggung jawabnya, oleh karena itu penanggulangan bencana sangat tergantung kinerja Badan Penanggualngan Bencana Daerah (BPBD).

## Kinerja BPBD dalam Menanggulangi Banjir di Kampung Lambing (Fendi IrawanS.)

Dari pengamatan awal yang penulis lakukan bahwa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat belum menjalankan sesuai pedoman tupoksi, menyebabkan tanggap bencana banjir di wilayah Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa terhambat bisa dikatakan tidak efisien, ini mengindikasikan bahwa kurangnya kinerja pegawai Badan penanggulangan Bencan Daerah (BPBD) Kutai Barat dalam menanggulangi korban bencana banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa.

Berangkat dari pemikiran di atas dan betapa pentingnya kinerja pegawai dalam keberhasilan suatu organisasi. Maka dengan itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Korban Bencana Banjir Di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat”.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimanakah kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat?

### ***Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah: Untuk memberikan gambaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

### ***Manfaat Penelitian***

Manfaat penelitian merupakan proses hasil dari tercapainya tujuan, maka dari itu tujuan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta menambah kepustakaan dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebuah lembaga.

#### 2. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut serta mengawasi instansi pemerintah dan sumbang saran kepada pemerintah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Kutai Barat.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian Kinerja***

Menurut Prawirosentono (dalam pasolong 2008:176) bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

### ***Pengertian Bencana***

Sedangkan menurut Ligal, (2008:35) Bencana banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana banjir dapat didefinisikan sebagainya hadirnya air disuatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut.

### ***Pengertian Banjir***

Banjir dalam pengertian umum ( Peraturan Direkur jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No.04 thn 2009 ). Adalah debit aliran air sungai dalam jumlah yang tinggi, atau debit aliran air di sungai secara relatif lebih besar dari kondisi normal akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu terjadi secara terus menerus, sehingga air tersebut tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya.

### ***Tugas dan Fungsi BPBD***

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat di pimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai Kepala Badan seperti yang di amanatkan Pasal 18 Undang-Undang 24 Tahun 2007 dalam pelaksanaannya Badan ini dipimpin seorang Kepala Pelaksana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsinya sebagai berikut

Tugas Pokok :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, mengimpormasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerahsetiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan Fungsi :
  1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### ***Definisi Konsepsional***

Konsep adalah suatu makna yang berada di alam pikiran atau di dunia kepehaman manusia yang di nyatakan kembali dengan sarana lambang perkataan atau kata-kata. Berdasarkan konsep-konsep itu peneliti memang dapat menata hasil pengamatannya kedalam suatu tata kepehaman yang menggambarkan dunia realitas sebagaimana yang dirasa, dialami dan diamati.

Maka berkenaan dengan penelitian ini penulis mendefinisikan konsepsional mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) yaitu “hasil kerja secara kualitas dan kuantitas, berdasar tugas tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana daerah dalam menanggulangi korban bencana banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa kabupaten Kutai Barat dengan wewenang memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai fungsi dan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana semua untuk meningkatkan kualitas dan kuatitas penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu, terencana, menyeluruh.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam, maka penelitian tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Menurut Moleong (2005:90) penelitian kualitatif yaitu : ”Suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara menyeluruh. dalam hal ini mengenai Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

### ***Fokus Penelitian***

Dari penjelasan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir Di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :
  - a. Kreativitas BPBD dalam menanggulangi korban bencana banjir.
  - b. Kerjasama pegawai BPBD dalam menanggulangi korban bencana banjir.
  - c. Kecakapan pegawai BPBD dalam menanggulangi korban bencana banjir.
  - d. Tanggung jawab BPBD dalam menanggulangi korban bencana banjir.
2. Faktor faktor pendukung dan penghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir Di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

### ***Sumber dan Jenis Data***

Sumber Data dapat diperoleh dari Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan Staf Logistik dan Sekretaris Desa sebagai Tokoh Masyarakat, di mana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Sumber Data ada dua jenis yaitu :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu Sumber data Penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli, sebagai berikut :

- a. *Key informan* (Informasi Kunci) nya yaitu Kepala Pelaksana BPBD.
  - b. Informannya yaitu Sekretaris BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan dan Staf Logistik yang diteliti dilakukan secara *Purposive sampling*. Menurut Sugiyono, (2004:60). *Purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data secara maksimal.
  - c. Informan Lainnya yaitu Sekretaris Desa sebagai Tokoh Masyarakat, yang dilakukan secara *Purposive sampling*, dimana menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data secara maksimal.
- #### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah Data Penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti,catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Seperti data-data yang mendukung dari buku-buku yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Untuk menunjang penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis memerlukan data sebagai pendukung keseluruhan terhadap penulisan proposal ini dalam mencari dan mengumpulkan data-data tersebut penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. *Library Research*, yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan proposal ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini. Termasuk dalam teknik ini adalah: Teknik Dokumentasi, Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.
2. *Field Work Research*, yaitu penulis mengadakan penelitian langsung di lapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
  - a) Observasi, dengan teknik ini penulis mengadakan pengamatan dan berusaha mengetahui serta mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Kutai Barat;
  - b) Wawancara, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer, melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur penulis dapat memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam tentang kinerja badan Penanggulangan Bencana Daaerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir di Kampung Laming Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.
  - c) Dokumen, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukunglainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

### ***Teknik Analisis Data***

Dari gambar analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman ( dalam Sugiyono, 2013:337), dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data(*Data Collection*)

Merupakan kegiatan awal yang berupa mengumpulkan data mentah dari suatu penelitian. Dalam mengumpulkan data ini peneliti harus turun sendiri ke lapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui, observasi partisipasi, dokumentasi, interview (wawancara), perekaman.

## 2. Reduksi Data(*Data Reduction*)

Diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuktikan dan sekaligus dapat membuktikan.

## 3. Penyajian Data(*Data Display*)

Merupakan tahapan berupa menguraikan data yang telah tersusun dengan cara tertentu agar bisa dapat lebih mudah memahami data. Penyajian data merupakan alur penting dalam tahap kegiatan analisis data guna penyajian data yang lebih valid..

## 4. Menarik Kesimpulan(*Concluction Drawing*)

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu proses kegiatan yang terakhir dilakukan dalam kegiatan analisis data.

## **Hasil Penelitian dan Analisis Data**

### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

#### ***Keadaan Geografis***

Kampung Lambing salah satu dari Kecamatan Muara Lawa luas wilayah lambing 51,91, jarak dari kampung Lambing ke Kabupaten Kutai Barat sejauh 58,00. Lambing letak Di luar kawasan hutan letak geografis Hamparan, jumlah laki-laki sebanyak 935 orang dan jumlah perempuan sebanyak 928 orang, suku lambing rata-rata suku dayak benuaq, Taman Kanak Kanak di lambing sebanyak 1 TK negeri, 2 TK swasta, 3 SD Negeri, 1 SD swasta, 1 SLTP negeri, 1 SMA negeri, 2 orang dokter, 1 orang bidan, masyarakat yang memakai PLN sebanyak 485 rumah, warung/kedai minuman sebanyak 10 warung, 25 toko warung kelontongan, 2 penginapan, 2 lapangan bola, 1 lapang voli, 1 lapangan bulutangkis dan 1 koperasi yang ada di lambing.

#### ***Batas-Batas Wilayah Kampung Lambing***

Adapun batas-batas wilayah Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa sebagai berikut :

1. Utara : Keay dan Jengan Danum
2. Selatan : Jerang Dayaq
3. Barat : Banggeris
4. Timur : Muara Lawa

#### ***Hasil Penelitian***

### ***Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Korban Bencana Banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.***

Dalam menanggulangi korban bencana banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri dari kreativitas BPBD dalam menanggulangi

Kinerja BPBD dalam Menanggulangi Banjir di Kampung Laming (Fendi IrawanS.)  
korban bencana banjir, kerjasama pegawai BPBD dalam menanggulangi korban bencana banjir, kecakapan pegawai BPBD dalam menanggulangi korban bencana banjir, Tanggung jawab BPBD dalam menanggulangi korban bencana banjir dan faktor faktor pendukung dan penghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir Di Kampung Laming Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian tentang program-program yang dilaksanakan sebagai berikut:

***Kreativitas BPBD Dalam Menanggulangi Korban Bencana Banjir.***

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala BPBD, sekretaris BPBD, kepala bidang pecegahan dan kesiapsiagaan, kepala seksi kedaruratan, staf logistic dan sekretaris desa kampung laming sebagai tokoh dapat disimpulkan Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, pegawai BPBD belum efektif kreativitas saat menanggulangi korban bencana, keberadaan BPBD dirasakan belum maksimal. Walaupun rumah warga banjir tinggi, yang membantu warga untuk evakuasi hanyalah BPBD, masyarakat dan perusahaan sekitar. Seharusnya BPBD memberikan peringatan dini kepada masyarakat khususnya masyarakat Kampung Laming Kecamatan Muara Lawa agar kerugian dapat dikurangi/dicegah dengan cepat.

***Kerjasama pegawai BPBD dalam menanggulangi Korban Bencana Banjir.***

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala BPBD, sekretaris BPBD, kepala bidang pecegahan dan kesiapsiagaan, kepala seksi kedaruratan, staf logistic dan sekretaris desa kampung laming sebagai tokoh dapat disimpulkan bahwa. dalam penanggulangan banjir BPBD melakukan kerja sama. Warga Kampung Laming belum merasakan manfaat kegiatan BPBD. Tetapi perusahaan disekitar Kampung Laming lebih cepat tanggap bencana banjir dengan memberi bantuan dan dilengkapi dengan peralatan maka ketika sudah terjadi bencana maka ketika warga turun pada waktu itu sudah ada yang lebih dulu ada di lokasi bencana, tetapi BPBD tidak ada.

***Kecakapan pegawai BPBD dalam menanggulangi Korban Bencana Banjir.***

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala BPBD, sekretaris BPBD, kepala bidang pecegahan dan kesiapsiagaan, kepala seksi kedaruratan, staf logistic dan sekretaris desa kampung laming sebagai tokoh dapat disimpulkan warga merasakan keberadaan dari fungsi BPBD. tetapi pernah banjir selama 3 hari, warga tidak pernah menemukan ataupun bertemu dengan anggota BPBD. Yang memberikan perhatian adalah Perusahaan yang berada di sekitar Kampung Laming yang sigap terhadap kondisi masyarakat Kampung Laming.

***Tanggung jawab BPBD dalam menanggulangi Korban Bencana Banjir.***

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala BPBD, sekretaris BPBD, kepala bidang pecegahan dan kesiapsiagaan, kepala seksi kedaruratan, staf logistic dan sekretaris desa kampung lambing sebagai tokoh dapat disimpulkan warga melihat fungsi BPBD baru turun ketika dana sudah ada. Seharusnya pemerintah daerah, memperhatikan dana BPBD, agar BPBD berfungsi dalam penanggulangan bencana yang terkena bencana. Kerja yang bisa dilakukan terlebih dahulu sambil menunggu keluarnya dana dari pemerintah Kabupaten seperti yang dilakukan oleh para relawan.

***Faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir Di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.***

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala BPBD, sekretaris BPBD, kepala bidang pecegahan dan kesiapsiagaan, kepala seksi kedaruratan, staf logistic dan sekretaris desa kampung lambing sebagai tokoh dapat disimpulkan bahwa, faktor pendukungnya BPBD yaitu keaktifan BPBD, cara pencegahan dan kesiapan BPBD apabila ada bencana banjir, tidak kekurangan dari sarana dan prasarana mereka atas perannya yang bertugas menolong warga, alat kelengkapan pertolongan yang ada, layak pakai apabila digunakan.

**Pembahasan**

***Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Korban Bencana Banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.***

Dari hasil penelitian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir menilai pegawai dari kreativitas, kerjasama, kecakapan, Tanggung jawab, faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi korban bencana banjir Di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yaitu :

***Kreativitas BPBD dalam menanggulangi korban bencana banjir.***

Pegawai BPBD harus memiliki kreativitas saat menanggulangi korban bencana banjir. Di kampung yang terkena bencana banjir, pegawai harus memiliki kreativitas dan cepat tanggap, yang terbagi disetiap kampung berjumlah 5 orang staf. Persiapan sebelum banjir, bentuk-bentuk kreativitas staf mempersiapkan tenda, pemasangan tenda dan penyaluran bantuan. Tingkat kreativitas staf BPBD sangat baik dalam bentuk membuat Kampung Siaga Bencana KSB, staf terbagi-bagi dari bidang Informasi dan komunikasi, sarana operasional, menyediakan segala bentuk kebutuhan alat maupun perlengkapan secara khusus maupun umum, mengevaluasi korban banjir, pencarian korban, penanganan pengungsi, korban luka dan korban meninggal. Dengan keahlian

Kinerja BPBD dalam Menanggulangi Banjir di Kampung Lambing (Fendi IrawanS.)  
bidang rescue atau penyelamatan untuk penanggulangan bencana bantuan sosial, perlengkapan P3K, bidang logistik, satuan logistik dan bidang dapur umum, anggota BPBD sudah mengikuti pelatihan dalam penanggulangan bencana.

### ***Kerjasama pegawai BPBD dalam menanggulangi Korban Bencana Banjir.***

Kerjasama pegawai BPBD sangat baik, dimana pegawai saling memotivasi dan pegawai BPBD kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kampung Lambing, seperti PT. BANPU, PT. TSA dan PT. PAMA. Meskipun bencana terjadi di Kabupaten Kutai barat, namun tidak banyak SDM yang memiliki kemampuan di bidang kebencanaan. Keterbatasan SDM, ini tentu saja menimbulkan masalah tersendiri terutama jika dikaitkan dengan upaya pembentukan BPBD di seluruh wilayah Kubar.

### **Kecakapan pegawai BPBD dalam menanggulangi Korban Bencana Banjir.**

Pegawai BPBD harus memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam penanggulangan korban banjir, yang dilakukan di tempat bencana penanggulangan korban masyarakat. kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran dalam mengerjakan penanggulangan korban bencana banjir anggota BPBD yang dilakukan tidak menimbulkan korban bencana banjir meninggal dunia. Namun kekurangannya karena pegawai/anggota BPBD belum sempat menyampaikan langsung peringatan dini kepada masyarakat. Kami hanya menyampaikan kepada aparaturnya di masing-masing kecamatan dengan harapan mereka dapat menyalurkan informasi tersebut tapi sepertinya belum tersampaikan ke masyarakat.

### **Tanggung jawab BPBD dalam menanggulangi Korban Bencana Banjir.**

Anggota BPBD bertanggung jawab keadaan pada saat banjir yang sifatnya siap menyelamatkan korban banjir baik itu kondisi di lapangan hingga berakhirnya kondisi banjir. Pegawai bertanggung jawab dalam menanggulangi korban bencana banjir, untuk lebih dekat dengan masyarakat maka BPBD telah membentuk posko penanggulangan bencana di tiap kecamatan dan telah berjalan selama kurang lebih satu tahun. Posko ini saya bentuk agar masyarakat yang terkena bencana dapat segera tertolong. Posko dilengkapi dengan beberapa peralatan dan logistik.

### **Penutup**

#### ***Kesimpulan***

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kreativitas pegawai BPBD saat menanggulangi korban bencana banjir cukup baik. Hanya saja kreativitas staf BPBD lebih ditingkatkan lagi, sehingga kreativitas dalam menanggulangi korban bencana banjir di daerah

rawan banjir dan memberikan pertolongan dalam penanggulangan korban banjir sesuai rencana.

2. Kerjasama pegawai BPBD dalam menanggulangi korban bencana banjir cukup baik, dimana team regu penyelamat BPBD tetap berkoordinir, bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya serta perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kampung Lambing, seperti PT. BANPU, PT. TSA dan PT. PAMA. BPBD juga tetap melakukan kerjasama dengan semua masyarakat sekitar korban bencana banjir atas bencana banjir yang dihadapi, sebagai salah satu tujuannya untuk meningkatkan kerjasama antara pihak instansi pemerintah dan perusahaan serta masyarakat sekitar bencana banjir, agar tercapainya sinergi dibutuhkan kerjasama.

### **Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk kinerja BPBD dalam menanggulangi korban bencana banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten kutai Barat diharapkan mampu lebih optimal dalam pelaksanaan menanggulangi korban bencana banjir agar fungsi kinerja BPBD dapat dirasakan masyarakat.
2. Untuk menunjang kinerja pegawai BPBD dalam menanggulangi korban bencana banjir hendaknya dapat memperhatikan lagi dalam perekrutan sumber daya manusia yang lebih selektif dari orang yang berkompeten dan handal agar kinerja pegawai BPBD sesuai harapan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Anwar Prabu Mangkunegara 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Asian Resources and Response Network (ADDRN). 2010. *Terminologi Pengurangan Risiko Bencana*.
- Azhar Arsyad. 2002. *Pokok-Pokok Manajemen, Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Gibson, et. al., terj. Djarkasih. 1994. *Organisasi*. Erlangga : Jakarta.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset : Yogyakarta.
- Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro. 2010. *Manajemen Bencana*. Media Pressindo : Yogyakarta.
- Hasibuan, S. P. Malayu. 2005. *Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah*. Bumi Aksara : Jakarta.
- M. Fuad, et. Al. 2006. *Pengantar Bisnis*. Erlangga : Jakarta.
- Prawirosentono, Suyadi. 1992. *Majemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia*. Bpfe : Yogyakarta.
- Robert J. Kodoatie dan Sugiyanto. 2002. *Banjir*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

- Kinerja BPBD dalam Menanggulangi Banjir di Kampung Laming (Fendi IrawanS.)  
Samsudin, Sadili. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pustaka Setia : Bandung.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju : Bandung.
- Siagan, Sondang P. 2001. *Kerang Kadasar Ilmu Administrasi*, Rineka Cipta : Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2003. *Filsapat Administrasi*, edisirevisi, penerbit bumi aksara : Jakarta.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Ketiga. STIE YKPN : Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Wahyudi, Bambang. 2002, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, Sulita : Bandung.
- Widodo, J. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Bayumedia Publishing : Jawa Timur.
- Zauhar, Soesilo. 2002. *Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bumi Aksara : Jakarta.

#### **Dokumen-Dokumen :**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinta Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 06 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupatern Kutai Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Menpan RB Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri.
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Memahami Bencana* (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2008)